

“AGAMA DAN KEKERASAN”

MENEMUKAN KEMBALI MAKNA SPIRITUALITAS MANUSIA

Achmad Charris Zubair

Kekerasan Sebagai Fenomena Kemanusiaan

Kekerasan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena yang sangat menarik, karena bagaimanapun kekerasan merupakan salah satu ke-paradoksalan manusia itu sendiri. Manusia memang oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang mulia dan merupakan sebaik-baik ciptaan¹. Ternyata juga merupakan makhluk yang menyukai kekerasan dan bahkan juga “tega” untuk saling menumpahkan darah, sebagaimana yang sebelumnya telah dikhawatirkan oleh para malaikat ketika Allah hendak menjadikan seorang khalifah Nya di muka bumi (Al Baqarah: 30).

Paradoks manusia meliputi ia makhluk jasmani sekaligus ruhani, makhluk individu sekaligus sosial, makhluk imanen sekaligus transenden, makhluk penuh cinta sekaligus kebencian, makhluk yang penuh kelembutan sekaligus kekerasan. Tentu saja keparadoksalan itu bukan sesuatu yang tanpa makna, ia mengisyaratkan tugas-tugas kemanusiaan, kendatipun batas-batas antara keduanya amat tipis. Tugas manusia untuk meruhankan hidupnya, mensosialisasikan hidupnya, mentransendensikan hidupnya, mengembangkan cinta kasih dan kelembutan, bukan sebaliknya.

Sejak manusia pertama kali dilahirkan, bahkan telah terjadi kekerasan dengan saling membunuh antara dua bersaudara anak Adam yakni Habil dan Qabil. Selama 5000 tahun sejarah ummat manusia, tercatat telah terjadi 8000 pertikaian yang diselesaikan melalui adu senjata. Sehingga dapat dikatakan hampir setiap tahun terjadi dua kali aksi kekerasan antar ummat manusia berupa peperangan yang melibatkan kelompok besar atau bangsa. Belum terhitung pertikaian antar kelompok kecil, antar dua bersaudara, antar suami-isteri, dan sebagainya.

Sehingga muncul pertanyaan, apakah memang kekerasan telah menjadi bawaan manusia itu sendiri yang tidak perlu dicegah? Toh dengan melihat kenyataan bahwa sejarah ummat manusia selalu diwarnai dengan kekerasan, telah menjadikan himbauan moral hanya basa-basi. Para pemikir barat seperti Thomas Hobbes seorang penganut empirisme dari Inggris (1588-1679) mengatakan bahwa kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia. Pandangan ini didasarkan atas anggapannya bahwa manusia merupakan makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, serta bersifat mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat dan “buas”. Pendapat serupa dikemukakan oleh Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) dari Austria yang mengatakan bahwa kekerasan merupakan salah satu dari empat naluri dasar manusia, di samping rasa takut, keinginan

¹ “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Al Israa’: 70).

seksual dan rasa lapar. Kebudayaan pada dasarnya merupakan pengolahan dan upaya mentransendensikan naluri tersebut.

Johan Galtung sosiolog dari Universitas Oslo mengatakan bahwa kekerasan ada apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa oleh situasi tertentu. Sehingga realisasi jasmani dan mental aktual berada dibawah realisasi potensialnya. Naluri kekerasan akan muncul bila ada kondisi yang mendorongnya. Salah satu picu pelatuk utama dari munculnya naluri kekerasan ini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan berarti membiarkan orang lain dianiaya, dari segi ini ketidakadilan menjadi kekerasan pada dirinya sendiri. Kepemimpinan yang tidak adil akan cenderung berubah menjadi kekuasaan, dan penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi picu dari tindakan kekerasan. Michel Foucault (1926-1984) mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pihak yang saling berhadapan, pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berkuasa atau dikuasai. Dari kondisi ini saja sudah tercermin ketidakadilan. Kepemimpinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia, tetapi kalau sudah disalahartikan menjadi kekuasaan yang menindas maka akan terjadi kekerasan sebagai bentuk perlawanan.

Dari sisi lain, kekerasan manusia juga akan muncul ketika tolok ukur normatif manusia bergeser dari tolok ukur transenden ke arah imanen. Keparadoksaan manusia seperti yang dikatakan di depan memiliki batas yang amat tipis. Sehingga manusia dapat saja berubah secara cepat untuk mengabaikan tugas-tugasnya selaku khalifah Allah di muka bumi ini. Ketika jasmani menjadi ukuran, individualitas menjadi ukuran, hal-hal yang bersifat imanen seperti harta-benda menjadi ukuran, maka hal tersebut akan memudahkan pula munculnya kekerasan karena dalam kondisi tersebut amat mudah timbul kedengkian dan kebencian. Sehingga kedua faktor kunci yakni: ketidakadilan dan tolok ukur yang keliru dalam memandang kehidupan seharusnya menjadi bahan pertimbangan munculnya tindak kekerasan manusia.

Agama Sebagai Pedoman

Manusia dilahirkan ke dunia dengan kondisi yang lemah, sangat tergantung pada pertolongan manusia lain yang lebih kuat, dan tidak memiliki sarana lengkap untuk menghadapi dan juga, menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Manusia memang, sebagaimana binatang, memiliki naluri, tetapi nalurinya semata-mata tidak cukup untuk menunjang hidup secara wajar. Ketidakberdayaan dan “ketidaksempurnaan”nya membuat manusia, sadar atau tidak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna keberadaan diri, keberadaan sesama serta yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya. Puncak pertanyaan sampai kepada keberadaan dari dzat yang mengatasi hidup manusia.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha untuk dicarikan jawabannya dengan serangkaian pengetahuan, positif dan spekulatif, yang berasal baik dari pengalaman empiriknya maupun yang dipercaya berasal dari “atas”. Kesemuanya itu akan bermuara pada agama dan keyakinan puncak atas sistem nilai dan norma kebenarannya serta akan mempengaruhi keputusan tindakan konkret manusia. Dalam bahasa teologis, agama diturunkan oleh Allah melalui manusia pilihanNya dengan maksud membimbing dan mengarahkan manusia untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan hakiki manusia. Pada tahap ini agama menjadi sistem kepercayaan yang tidak lagi seutuhnya dapat dipahami oleh pemeluk agama lain.

Parsudi Suparlan menulis dalam artikel “Kebudayaan dalam Pembangunan” yang dimuat dalam **Majalah Dialog** Departemen Agama RI no 21 1986: Agama secara umum seringkali didefinisikan sebagai perangkat aturan yang memberikan pedoman hubungan manusia

dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Tetapi batasan tersebut sangat terkesan tekstual dan doktriner, sehingga keterlibatan manusia sebagai subjek tidak nampak di dalamnya. Maka agama lebih lanjut seharusnya diartikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut, dan berupa tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan serta dalam rangka memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Agama sebagai sistem keyakinan akhirnya dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, menjadi pendorong sekaligus pengendali bagi tindakan-tindakan anggota masyarakat tersebut agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaannya.

Pandangan lain yang senada diungkapkan oleh Arief Budiman dalam artikelnya tentang **Agama Demokrasi dan Keadilan** (1993) yang membagi agama dalam dua kategori. Pertama, sebagai keimanan, di mana orang percaya terhadap kehidupan abadi di kemudian hari, kemudian orang mengabdikan dirinya untuk kepercayaannya itu. Di sini agama dilihat sebagai masalah teologi. Kedua, dalam terminologi ilmu sosial, agama dilihat sebagai nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku manusia.

Mengacu pandangan di atas, harus diakui, bahwa wilayah peran agama menjadi luas karena meliputi seluruh aspek kehidupan manusia konkret-historis. Clifford Geertz dalam **The Interpretation of Culture** (1973) menulis bahwa: Agama dalam kebudayaan dapat berfungsi sebagai berikut: (1) Sistem simbolik yang berfungsi dalam mengatur keputusan tindakan manusia untuk (2) memantapkan, meresapkan perasaan-perasaan, motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh dan bertahan lama dalam diri manusia dengan cara (3) memformulasikan konsepsi-konsepsi keteraturan dan atau tata tertib kehidupan serta (4) menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan aurora tertentu secara nyata sehingga (5) perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersebut bersifat nyata.

Dari pandangan tersebut kita dapat melihat bahwa agama dengan ajarannya dapat mempengaruhi secara kuat terhadap sistem-sistem kebudayaan. Mengacu pula dengan pandangan di atas, harus diakui, bahwa wilayah peran dan fungsi agama adalah kehidupan manusia konkret-historis, dari lahir hingga mati, dalam arti individu atau sosial. Agama adalah “jiwa” dari kewajiban-kewajiban mutlak yang harus ditunaikan pemeluknya (**deontologis**) serta jiwa dari sesuatu yang mengandung tujuan bagi penentuan titik orientasi hidup pemeluknya (**teleonomis**).

Tentu saja, agama sebagai sistem nilai dan norma bagi manusia dalam kebudayaan, bukannya sama sekali bebas dari masalah. Fenomena paling aktual adalah kekerasan yang terjadi sering dibalut oleh agama, sehingga seolah-olah agama meligitimasi segala bentuk kekerasan. Edouard Bone, menulis artikel **Bioetika Dalam Masyarakat Majemuk** (1990), bahwa orang modern hidup dalam masyarakat yang majemuk, baik dari segi kebudayaan, norma maupun agama. Ini merupakan fakta yang tidak dapat dirubah dan harus diterima begitu saja. Pada kebanyakan bangsa modern terdapat berbagai macam tradisi moral serta filosofis yang berbeda-beda dan kontribusinya masing-masing secara bersama-sama membentuk jalinan sosial komunitas-komunitas kita. Masyarakat modern juga cenderung mengurangi kendala-kendala tradisional, misalnya dengan menghormati individualitas dan perbedaan-perbedaan pribadi. Dalam waktu bersamaan modernitas mengakibatkan sistem-sistem religius dan moral mengalami privatisasi. Sekularisasi yang terjadi dalam masyarakat modern, telah membuka suatu kawasan netral, di mana nilai-nilai baru seperti toleransi, objektivitas, hormat dan pandangan luas dijunjung tinggi atas dasar kebebasan seluas-luasnya untuk memilih dan menentukan. Di sini tidak diberikan penilaian, apakah ini suatu “kemajuan” atau “ke-

munduran”, tetapi sekedar konstataasi. Yang pasti ialah bahwa tekanan pada kebebasan individu ini terungkap dalam suatu liberalisasi tingkah laku dan moral. Perlu ditambahkan bahwa masyarakat modern menekankan pada efisiensi dan hasil nyata yang bersifat empirik.

Sekarang manusia hidup dalam jaman yang berubah dan berkembang secara cepat, karena kemampuan rekayasa manusia itu sendiri telah jauh melampaui batas dari yang dapat terkontrol oleh perhitungan kemanusiaan itu sendiri. Perubahan dan perkembangan yang di satu pihak membawa kemajuan, tetapi di pihak lain membawa kegelisahan, serta kekhawatiran manusia sendiri. Pengaruh buruk ini dapat muncul karena telah terjadi pelebaran jarak antara manusia dengan dirinya sendiri, karena ketidakpahaman manusia sendiri terhadap batas-batas kemanusiaan dan otonominya. Melebarnya jarak antara dirinya dengan sesama dan alam lingkungannya, karena manusia tidak lagi merasa sebagai bagian dari sosialitas dan alam semesta, tetapi telah berdiri sendiri dengan penuh keangkuhan selaku individu yang bahkan harus mengatasi sesama dan alam lingkungan. Terjadi jarak dengan Tuhan, karena pemahaman tentang realitas transenden yang gaib semakin tak terbayangkan oleh rasionalitas manusia yang telah membuktikan kemandiriannya dan bahkan telah mulai merambah pada bidang perubahan hukum alam.

Agama yang sepanjang sejarah manusia menjadi sistem nilai dan norma manusia, akhirnya ditantang oleh manusia sendiri untuk menyesuaikan diri dengan ambisi-ambisi manusia, dengan keinginan-keinginan manusia yang nyaris tak terbatas. Konsepsionalisme agama akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan prinsip yang didasarkan atas tuntutan fungsionalitas agama menyelesaikan masalah konkret.

Mangunwijaya menulis dalam artikel **Kosmologi Baru Agama dan Demokratisasi Bangsa** (1993) bahwa dewasa ini ada pemikiran kosmologi baru yang sedang berkembang. Kosmologi tradisional melihat seluruh alam sebagai suatu kesemestaan yang diciptakan Tuhan, dan memiliki awal dari ruang-waktu dan akhir ruang-waktu. Tetapi apakah yang disebut sebagai ruang-waktu tersebut tidak pernah ditanyakan oleh manusia tradisional. Ilmu pengetahuan mengajarkan suatu gambaran kosmos yang lain sama sekali bila dibandingkan dengan yang diberikan oleh para guru tradisional, termasuk guru-guru agama. Demikian pula manusia yang hidup secara tradisional mempunyai pandangan, konsep, interpretasi tentang apa yang disebut materi, alam semesta, hidup-mati, awal jaman dan kiamat. Kesemuanya merupakan suatu gugusan informasi maupun imbauan tentang yang mereka anggap real, objektif, serta merupakan sumber kehidupan. Namun juga meliputi nilai-nilai dan maknanya. Sehingga berkat itulah manusia merasa dapat mengenal diri, menemukan tempat, situasi, status dan identitas diri sendiri, serta orientasinya dalam suatu totalitas integral dengan semesta. Tetapi kalau pemahaman tentang manusia yang ada, baik mikro maupun makro beserta seluruh tata-nilai serta tata-pemaknaannya berubah secara radikal, jelaslah bahwa manusia menghadapi suatu kosmologi serba baru yang membawa tata nilai serta pemaknaan yang juga serba baru. Jelaslah jika ilmu pengetahuan dan teknologi membawa suatu perubahan gambaran kosmos menjadi baru, manusia yang beragamapun akan terkena dampaknya.

Persoalan yang kita hadapi sesungguhnya ketika perubahan itu bersifat mendadak dan tidak pernah disiapkan secara utuh oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti misalnya, masyarakat yang hidup di negara-negara berkembang mempunyai pandangan kosmologis yang tiba-tiba saja harus berubah, karena gencarnya arus teknologi sebagai produk datang dan “menimpa” mereka. Perubahan mendadak tersebut telah membuat nasib masyarakat seperti “di langit tak bergantung, di tanah tak berpijak”.

Kekerasan di Indonesia

Sepanjang tahun 1996 dan awal 1997 di Indonesia paling tidak ada 9 peristiwa kekerasan: peristiwa penyanderaan di Timika, peristiwa Dilli, peristiwa Ujung Pandang, peristiwa PDI Surabaya dan Jakarta, peristiwa 27 Juli, peristiwa Situbondo, peristiwa Tasikmalaya, peristiwa Sanggau Kalimantan Barat. Belum terhitung tawuran antar pelajar, tawuran antar preman di Tanah Abang Jakarta, kekerasan yang (selalu) dilakukan oleh suporter sepakbola dari Surabaya, kekerasan yang dilakukan oleh para polisi ketika hendak mengorek pengakuan tersangka, sehingga kadang-kadang sampai mati. Belum lagi kekerasan sebelumnya dan sesudahnya di Aceh, Tanjung Priok, Timor Timur, Irian Jaya buat orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan.

Sementara sepanjang tahun 1998, penuh dengan kekerasan yang sangat tidak dapat diterima akal sehat. Bahkan bisa dikatakan, nyaris sepanjang tahun di Indonesia terjadi peristiwa kekerasan. Kasus penembakan mahasiswa di Jakarta bulan Mei dan November, kasus dukun santet di Jawa Timur, kasus perkosaan yang hampir-hampir mengerikan, seperti pemotongan payudara dan memasukkan botol ke dalam vagina dan kemudian botolnya dipecahkan (lihat pengakuan Ita Fathia Nadia Direktur Kalyana Mitra pada sidang gugatan kasus Mei 1998 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dapat dibaca di Tabloid Aksi Vol.3 No. 111 hal.16), kasus Ketapang Jakarta, Kupang, Poso dan kota-kota lain di Indonesia. Di desa-desa masyarakat yang jagonya dalam pencalonan kepala desa kalah mengamuk, yang tidak disetujui bahkan dibunuh, kita mendengar dan membaca bagaimana orang-orang Indonesia yang selama ini dikenal murah senyum dan ramah tamah menyiksa dan membunuh sesamanya dengan tertawa-tawa. Kita melihat gambar di koran dan televisi bagaimana manusia yang disiksa, dibunuh, diseret sementara pelakunya berwajah biasa bahkan tertawa sementara penonton yang lain gembira seolah-olah melihat tontonan yang menarik.

Dalam melihat peristiwa kekerasan di Indonesia setidaknya ada 4 faktor yang harus diperhatikan. (1) Faktor Indonesia sendiri sebagai negara yang sedang berkembang di masa orde baru yang mengembangkan konsep pembangunan ekonomi semata-mata. Dengan konsep pembangunan yang cenderung pada ekonomi jelas akan membawa dampak pergeseran tolok ukur ke arah dimensi materialistik menjadi lebih dominan. Faktor tersebut ditambah dengan (2) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Indonesia lebih bersifat menerimanya sebagai barang jadi, sehingga keinginan memiliki produk kemewahan hasil teknologi seringkali tidak seimbang dengan kebutuhan yang sesungguhnya. (3) Faktor kemajemukan Indonesia, keanekaragaman akibat faktor geografis, etnis, agama dan latar belakang kultural bangsa Indonesia dapat menjadi picu pelatuk kekerasan kalau tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan dampak negatif pembangunan dan produk teknologi. (4) Kendatipun Indonesia memiliki Pancasila, ia baru teruji dari dimensi idealitas, sedangkan pada dimensi realitas dan fleksibilitas belum teruji sepenuhnya. Bahkan nyaris hanya menjadi slogan yang tak bermakna, menjadi alat untuk menghantam lawan-lawan politik misalnya dengan menyiapkan tuduhan anti Pancasila, sebagai alat legitimasi dan status quo penguasa seperti dengan Penataran P4 dan sebagainya. Para pemimpin bangsa terbukti melakukan persekongkolan untuk memperkaya diri dan menindas rakyat. Sehingga secara diam-diam rakyat yang termiskinkan menyimpan dendam kesumat yang tak berkesudahan dan sulit dicari ujung pangkal akar permasalahannya.

Islam Sebagai Cara Pendekatan

Islam, secara ideal merupakan agama yang amat menekankan pada keadilan, ayat-ayat Al-Qur'an amat banyak yang menyinggung masalah keadilan sebagai sendi-sendi kehidupan². Persoalannya sejauhmana ummat Islam sendiri tidak menggunakan ajaran agama sebagai tindakan reaktif melainkan menjadikannya proaktif sebagai motivator seluruh keputusan tindakan. Kekerasan sebagai bagian dari hidup manusia ditransendensikan dengan pemahaman agama menjadi kekuatan produktif. Akhlak Islam akan mengantarkan pemahaman terhadap tolok ukur yang sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia itu sendiri.

Islam, secara realitas di Indonesia merupakan mayoritas. Persoalannya sejauhmana meningkatkan kualitas mayoritas tersebut dibarengi dengan upaya untuk lebih membuat homogenitas mayoritas Islam tersebut, sebab selama ini Islam sebagai mayoritas sesungguhnya belum mampu menyelesaikan persoalan kualitas dan homogenitas, ummat Islam Indonesia masih terasa majemuk sekali. Sehingga sesama ummat seringkali masih menggunakan ungkapan "kita" dan "mereka", padahal sesama ummat seharusnya yang digunakan hanya satu ungkapan yakni "kita".

Contoh Analisis Kasus Kekerasan

Seorang mahasiswa Fakultas Filsafat, Fahrizal Azmi Halim menulis analisisnya tentang kasus Tasikmalaya dalam tugas mata kuliah Etika Pancasila (1997) yang saya asuh sebagai berikut:

Peristiwa Tasikmalaya jelas sekali menunjukkan peluang kekerasan dengan adanya tindakan main hakim sendiri dari aparat kepolisian. Semua orang akan sepakat bahwa tindakan main hakim sendiri tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Peristiwa kekerasan tersebut tidak akan ada jika peluang-peluangnya ditutup sedemikian rupa. Jika aparat kepolisian tidak bertindak main hakim sendiri, tentunya tidak akan ada reaksi mass yang berlebihan. Selanjutnya apakah tindakan main hakim sendiri aparat kepolisian itu hanya mengikuti naluri? Naluri sebagai kemampuan dasar dan tendensi kejiwaan yang dibawa manusia sejak lahir memang tidak dapat digantikan dengan yang lain. Seperti rasa lapar tidak dapat diganti dengan yang lain, yang dapat dilakukan adalah menahan sementara waktu sesuai dengan lingkungan tertentu berdasarkan moralitas yang berlaku. Percival M. Symonds seorang yang menganut teori "Psikologi Dinamika" mengatakan bahwa dorongan naluri seseorang dapat disesuaikan dengan kebudayaan dan masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Karena manusia adalah makhluk yang berkebudayaan, di mana kebudayaan itu bersifat dinamis, maka naluri pun dapat mengalami dinamika, sehingga manusia dapat memilih tindakan yang lebih memiliki kualitas ruhani. Dengan demikian aparat kepolisian harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan di mana

² "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (Al Baqarah: 143).

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan" (Ali Imran: 18)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (An Nisaa: 58)

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu" (An Nisaa: 135)

"Katakanlah: 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan' (Al A'raaf: 29).

ia hidup dan bertugas. Contoh peristiwa Tasikmalaya menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat yang bermakna kekerasan sehingga menimbulkan perlawanan karena orang tidak menemukan jalan lain untuk memperjuangkan keadilan.

Wallahu'alaam bi shaawab.

COPY